

**SKRIPSI**

**PENGARUH RETRIBUSI OBJEK WISATA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PINRANG**



**OLEH:**

**MARHAMA**

**NIM: 19.2800.057**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**PENGARUH RETRIBUSI OBJEK WISATA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PINRANG**



**OLEH :**

**MARHAMA  
NIM: 19.2800.057**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi  
(S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Retribusi Objek Wisata Terhadap  
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Marhama

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2800.057

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No.B.2684/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E, M.M.

NIP : 19911030 201903 1 006

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP 19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengaruh Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang  
 Nama Mahasiswa : Marhama  
 Nomor Induk Mahasiswa : 19.2800.057  
 Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.2684/In.39.8/PP.00.9/07/2022  
 Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.	(Ketua)	 (.....)
Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E, M.M.	(Sekretaris)	 (.....)
Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Anggota)	 (.....)
Mustika Syarifuddin, M.Sn.	(Anggota)	 (.....)

Mengetahui:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas nikmat yang sangat luar biasa serta kemudahan yang diberikan sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan semestinya. Sholawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat hebat yaitu Bapak Ahmad dan Ibu Ernawati, dimana dengan cinta, pengorbanannya, nasihat-nasihat baiknya dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik ini. Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan serta bimbingan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E, M.M. selaku Dosen Pembimbing penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan media belajar di IAIN Parepare menuju ke arah lebih baik.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E, M.M. selaku penanggung jawab Program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah atas jasanya telah

mengembangkan Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah menjadi lebih baik.

4. Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd dan Ibu Mustika Syarifuddin, M.Sn. selaku penguji serta Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E, M.M. selaku pembimbing sekaligus penguji
5. Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik beserta Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare. Dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Sebagai ungkapan terima kasih skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua yang sangat hebat dan paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Ahmad dan Ibu Ernawati yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tak henti-hentinya memberikan saya cinta, do'a, nasihat, semangat, dan dukungan. Terima kasih telah mempercayai saya dan mendukung keputusan serta pilihan dalam hidup saya.
8. Adik kandung saya tercinta Muhammad Farhan dan Muhammad Hafidz yang senantiasa telah memberi semangat, do'a, dan dukungan.
9. Rafika Ibrahim dan Burhanuddin sahabat saya dan orang dibalik layar terima kasih selalu membersamai suka dan duka, dan memberi dukungan serta semangat.
10. Teman-teman Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Angkatan 3 terimakasih atas dukungan dan kenangannya.
11. Terakhir, terima kasih diri saya sendiri, Marhama atas segala kerja keras serta semangatnya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Mari melihat

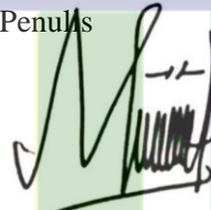
dunia yang lebih luas lagi dan mari bertemu dengan manusia-manusia baik dan hebat di dunia yang luas ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Membalas segala kebaikan dan menjadikannya sebagai amal jariyah serta senantiasa memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan kritik dan saran demi ksempurnaan skripsi ini.

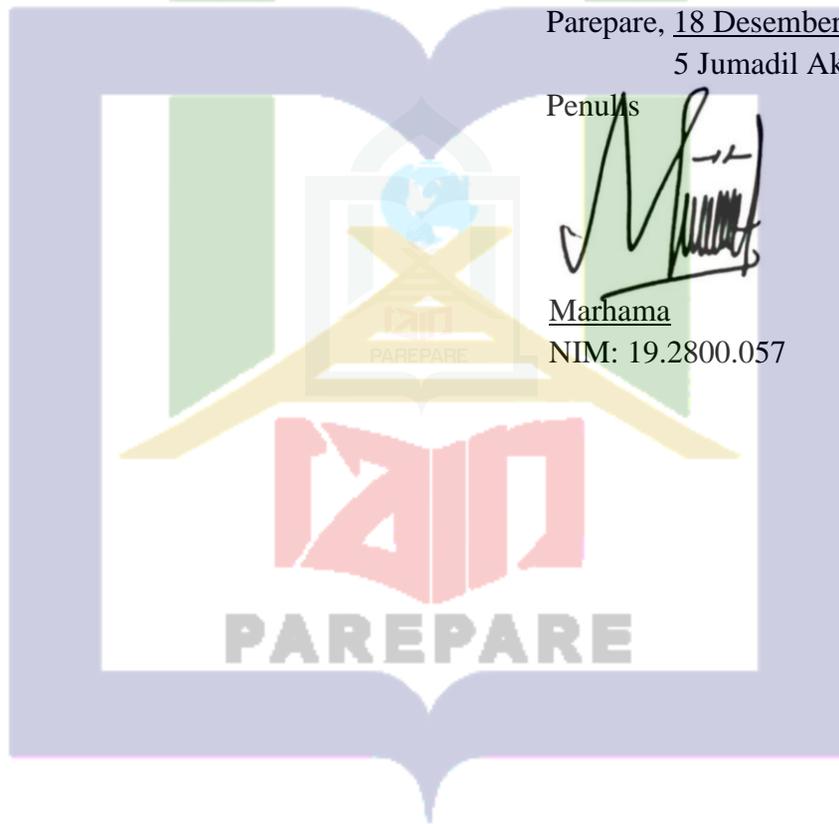
Parepare, 18 Desember 2023  
5 Jumadil Akhir 1445 H

Penulis



Marhama

NIM: 19.2800.057



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

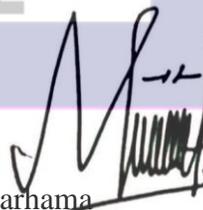
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marhama  
NIM : 19.2800.057  
Tempat/Tgl. Lahir : Bonging-Ponging, 03 Oktober 2001  
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Pengaruh Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Desember 2023

Penyusun,



Marhama

NIM. 19.2800.057

## ABSTRAK

**Marhama**, *Pengaruh Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Zainal Said dan Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin).

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh retribusi objek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pinrang dan seberapa besar pengaruh retribusi objek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah laporan PAD Kabupaten Pinrang periode 2018-2022. Sampel penelitian adalah laporan retribusi objek wisata tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan satu variabel dependen (X) yaitu Retribusi Objek Wisata dan satu variabel independen (Y) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

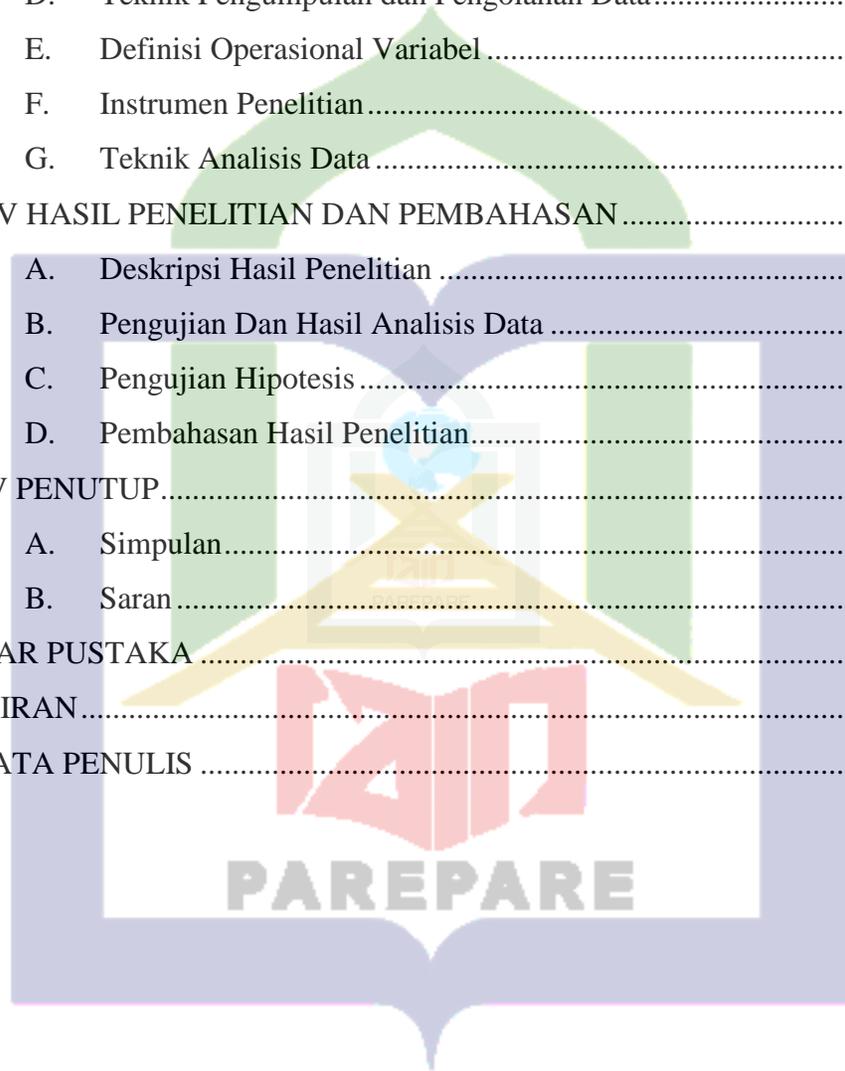
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Retribusi Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang hanya berkisar antara 0,07% sampai 0,16%. Pada tahun 2018 kontribusi objek wisata sebesar 0,14% terhadap PAD dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,16% sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,07% dan untuk tahun 2021 sebesar 0,10% sedangkan untuk tahun 2023 sebesar 0,11% dan variabel Retribusi Objek Wisata tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang.

Kata Kunci : Retribusi, Objek Wisata, Pendapatan Asli Daerah

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori .....	10
1. Desentralisasi Fiskal : Aspek Teori .....	10
2. Retribusi.....	13
3. Pariwisata.....	26
4. Pendapatan Asli Daerah.....	31
C. Kerangka Pemikiran .....	36
D. Hipotesis Penelitian.....	37

BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Populasi dan Sampel.....	39
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
E. Definisi Operasional Variabel.....	40
F. Instrumen Penelitian.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	47
B. Pengujian Dan Hasil Analisis Data.....	51
C. Pengujian Hipotesis.....	56
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	57
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	74
BIODATA PENULIS.....	81



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Tahun 2018-2022	4
1.2	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 – 2022	5
3.1	Interpretasi Hubungan Antar Variabel	47
4.1	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Objek Wisata Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022	49
4.2	Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022	50
4.3	Hasil Analisis Kontribusi Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022	51
4.4	Hasil Uji Statistik Deskriptif	52
4.5	Hasil Analisis Kontribusi Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022	53
4.6	Hasil Uji Normalitas	54
4.7	Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana	56
4.8	Hasil Uji Parsial (Uji T)	57
4.10	Hasil Uji Korelasi Person Product Moment	58
4.11	Data Penerimaan Retribusi Objek Wisata dan PAD Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022	68

**DAFTAR GAMBAR**

<b>No. Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Kerangka Pikir	38
4.1	Hasil Uji Heterokedastisitas	55



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Output Penelitian	75
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Kampus	78
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah Daerah	79
4	Surat Selesai Meneliti	80
5	Biodata Penulis	81



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Transliterasi

##### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	EnP
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

## c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ آ	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Mata

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

## d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: Raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	: Rabbana
نَجَّيْنَا	: Najjaina
الْحَقُّ	: Al-Ḥaqq
الْحَجُّ	: Al-hajj
نُعَمُّ	: Nu‘‘ima
عَدُوُّ	: ‘Aduwwn

Jika huruf **ى** ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ	: ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
عَلِيٌّ	: ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **لا** (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ	: Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: Al-Zalzalah (bukan az-zalzalalah)
الفَلْسَفَةُ	: Al-Falsafah
الْبِلَادُ	: Al-Bila>du

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

h. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), sunah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi> z}ila>l al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibara>t bi 'umum al-lafz } la> bi khusus al-sabab

i. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ      Dīnullāh                      بِاللَّهِ      Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      Hum fi rahmatillah

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma> muhammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wudi' alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan

Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi>

Abu> Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al- Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d (bukan: Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
r.a	=	<i>radiallahu 'anhu</i>
QS.../...4	=	QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	مكان بدون
صهعى	=	وسلم عليه صلواته
ط	=	طبعة
دن	=	بدونناشر
الخ	=	الباخرة/لآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki potensi alam, keaneka ragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala, serta seni dan budaya yang semua itu merupakan sumber daya dan modal yang besar bagi peningkatan pariwisata. Setiap daerah di Indonesia memiliki wisata yang unik dan memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi wisatawan baik itu objek wisata, sarana transportasi, akomodasi, restoran dan rumah makan, hiburan serta interaksi social antara wisatawan dan penduduk setempat.

Pariwisata merupakan salah satu sector utama dalam pembangunan ekonomi. Pariwisata menghasilkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dalam suatu Negara. Pariwisata merupakan salah satu industry yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sector produksi lain didalam Negara penerima wisatawan. Pariwisata merupakan salah satu sektor penunjang pendapatan suatu daerah. Oleh karena itu pengembangan pariwisata terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memaksimalkan potensi yang ada di daerah tersebut. Sejak tahun 1978 pemerintah terus berusaha mengembangkan kepariwisataan di Indonesia. Pariwisata perlu ditingkatkan dan diperluas untuk meningkatkan penerimaan devisa, dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan maupun pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan pelestarian budaya serta kepribadian nasional. Bentuk lain dari keseriusan pengembangan kepariwisataan diseluruh wilayah Indonesia oleh pemerintah yaitu dengan membuat Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan

kepariwisataan. Salah satu dari peraturan tersebut yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa<sup>1</sup>.

Pariwisata termasuk salah satu industri yang padat karya. Pengembangan industri ini juga menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan daerah, selain itu sector pariwisata dapat merangsang investasi infrastruktur baru untuk menunjang keberlangsungan pariwisata dalam suatu daerah. Untuk memperbesar pendapatan asli daerah maka pemerintah perlu mengembangkan dan memfasilitasi tempat pariwisata, agar sector pariwisata dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Perkembangan pariwisata berdampak terhadap kondisi social ekonomi masyarakat, salah satu di antaranya adalah dampak pariwisata terhadap pendapatan pemerintah. Sektor pariwisata merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk memperbesar pendapatan asli daerah, oleh karena itu program pengembangan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Menurut Darsini dan Darsana , program pengembangan sektor pariwisata harus dikaitkan dengan pengembangan ekonomi nasional, wilayah maupun lokal. Peranan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi dapat menambah lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Perkembangan pariwisata setiap tahunnya mengalami peningkatan, berbagai daerah memiliki tempat wisata yang beragam dan unik, mulai dari yang berskala nasional maupun internasional. Indonesia memiliki banyak sekali tempat wisata dan berbagai kebudayaan yang unik dimata dunia.

Kepariwisataan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam mensukseskan peningkatan perekonomian daerah, diperlukan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata di

---

<sup>1</sup> Fawaidul Khoir, Hety Mustika Ani, and Wiwin Hartanto, "Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2017," *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 12, no. 2 (2018): h.199.

daerah tersebut.<sup>2</sup> Peranan sektor pariwisata semakin penting dalam kemajuan pembangunan nasional maupun regional, khususnya dalam bidang ekonomi. Selain sebagai salah satu sumber pendapatan nasional maupun regional yang potensial. Peranan sektor pariwisata juga membuka peluang kesempatan yang luas terciptanya lapangan pekerjaan. Salah satunya yaitu industri pariwisata yang merupakan salah satu sektor industri yang memberikan dampak besar bagi kemajuan suatu negara atau daerah. Dampak besar yang di peroleh diantaranya meningkatkan pemasukan devisa negara dan pendapatan nasional. Selain itu juga, diharapkan mampu menunjukkan peranannya pada sektor perekonomian, lapangan pekerjaan, sosial dan budaya.

Bagi Indonesia, sektor pariwisata semakin berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itulah sebabnya pemerintah telah menetapkan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas dalam pembangunan.

Fasilitas yang terdapat pada Daerah Wisata merupakan faktor yang mempengaruhi kenaikan jumlah wisatawan yang berkunjung kesuatu daerah. Dengan bertambahnya fasilitas yang ada pada Daerah Wisata maka akan membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung, karena wisatawan merasa tenang saat berwisata. Fasilitas yang tersedia di Daerah Wisata bisa berupa jumlah kamar hotel yang tersedia di sekitar lokasi wisata yang akan mereka kunjungi. Tidak hanya fasilitas, infrastruktur jalan juga sangat mempengaruhi kenaikan jumlah wisatawan yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.<sup>3</sup> Dengan infrastruktur yang baik maka wisatawan akan merasa nyaman saat melakukan perjalanan wisata.

Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki potensi di sector pariwisata. Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24

---

<sup>2</sup> Rosmiati, Zainal Said, Muh. Yasin Soumena, "Strategi Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Wisata Syariah Kota Pare-Pare" Volume 1 (2022): h.46.

<sup>3</sup> A.J Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),h.111-112.

kabupaten/kota dan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Pinrang. Kabupaten Pinrang memiliki banyak sekali objek wisata yang begitu menarik diantara lain objek wisata alam, wisata kuliner, dan wisata-wisata lainnya. Hal ini dapat bermanfaat sebagai pengenalan sector pariwisata di Kabupaten Pinrang dan akan meningkatkan penerimaan daerah dalam sector pariwisata. Berikut jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di Kabupaten Pinrang pada tahun 2018-2022.

**Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Tahun 2018-2022**

Tahun	Wisatawan Nusantara (Jiwa)	Wisatawan Mancanegara (Jiwa)	Total
2018	14.736	-	14.736
2019	17.508	-	17.508
2020	7.379	-	7.379
2021	11.300	-	11.300
2022	14.239	28	14.267

*Sumber Data : BPS Kab. Pinrang*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari tahun 2018 hingga 2022 jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan berjumlah 14.736, kemudian ditahun 2019 kembali mengalami kenaikan berjumlah 17.508, ditahun berikutnya pada 2020 mengalami penurunan yaitu berjumlah 7.379, kemudian di tahun berikutnya 2021 kembali mengalami kenaikan berjumlah 11.300, dan ditahun 2022 mengalami kenaikan berjumlah 14.267. Berikut ini tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang tahun 2017 – 2020.

**Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 – 2022**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang (Rupiah)
2018	130.651.477.245,00
2019	133.363.942.030,00
2020	131.176.927.320,00
2021	134.066.655.481,00
2022	158.148.316.205,00

*Sumber Data : BPS Kab. Pinrang*

Dari table diatas, dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan diharapkan tahun-tahun selanjutnya dapat lebih meningkat supaya kondisi perekonomian Kabupaten Pinrang menjadi lebih baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran potensi keuangan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Mengenai retribusi daerah di dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang yang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat memanfaatkan potensi ini sebagai sumber pajak/retribusi daerah yang berupa objek wisata. Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata bukanlah penyumbang terbesar pendapatan daerah, tetapi apabila kita mengelolanya dengan serius, bukan tidak mungkin sektor ini dapat menjadi penyumbang terbesar pendapatan asli daerah.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Seberapa besar kontribusi retribusi objek wisata dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pinrang?
2. Apakah retribusi objek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

### C. Tujuan Penelitian

Merespon rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui kontribusi retribusi objek wisata dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi objek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang.

### D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian berikutnya untuk memperoleh informasi dan memberikan tambahan pengetahuan tentang sumber penerimaan PAD di Kabupaten Pinrang, khususnya pendapatan di sector pariwisata.
2. Secara praktis, ada beberapa manfaat penelitian yang dapat dipetik dalam pelaksanaan penelitian sebagai berikut :
  - a. Bagi peneliti, Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan atas pengetahuan mengenai pencapaian retribusi pendapatan objek wisata di dinas pariwisata di Kabupaten Pinrang. Serta memperoleh kesempatan menerapkan pengetahuan teoritis yang didapat selama di perkuliahan dalam berbagai bidang dunia kerja dan di kehidupan sehari-hari.
  - b. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan pariwisata di Kabupaten Pinrang.
  - c. Bagi akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambahkan koleksi diperpustakaan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian lainnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Penelitian oleh Fernanda Arraniry berjudul “Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2012-2016”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah hotel, panjang jalan, serta produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil dan penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2012-2016, jumlah hotel, dan produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan, jumlah wisatawan dan panjang jalan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.<sup>4</sup> Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti terletak pada metode yang digunakan, serta lokasi penelitian.
2. Maelin Sofiya Hidayati dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah (Studi kasus di Pulau Jawa Tahun 2010-2018)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah di Pulau Jawa tahun 2010-2018. Dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari 6 provinsi di Pulau Jawa periode 2010-2018. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Pulau Jawa

---

<sup>4</sup> Fernanda Arraniry, “Analisi Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat” (2018).

tahun 2010-2018.<sup>5</sup> Perbedaan penelitian Maelin Sofia Hidayati dengan peneliti adalah Maelin Sofia Hidayati berfokus pada dana perimbangan dan jumlah penduduk sedangkan peneliti berfokus pada retribusi Pariwisata.

3. Yulian Anshita Dewi, dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Indeks Pembangunan Manusia dan Investasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2010-2019”. Penelitian ini membahas tentang kemiskinan yang terdapat di Provinsi Bali dengan mengambil kasus di 9 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh PAD, UMK, IPM, dan investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder. Data dalam penelitian ini merupakan data berkala (time series) dan data silang (cross section). Analisis data menggunakan metode regresi data panel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2019. Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2019. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2019. Investasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2019.<sup>6</sup> Perbedaan Penelitian Yulian Anshita Dewi dengan peneliti adalah penelitian Yulian Anshita Dewi membahas tentang hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan kemiskinan di Provinsi Bali sedangkan peneliti membahas tentang hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan retribusi objek wisata.

---

<sup>5</sup> Maelin Sofiya Hidayaty, “ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Kasus Di Pulau Jawa Tahun 2010-2018)” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020).

<sup>6</sup> Yulian Anshita Dewi, “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN INVESTASI TERHADAP KEMISKINAN (Studi Pada Provinsi Bali Tahun 2010-2019)” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021).

4. Rita Martini, Septian Bagus Pambudi, M.Husni Mubarak, dengan judul “Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan asli Daerah Kota Palembang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta capaian target setiap jenis retribusi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2013 sampai 2017 ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh kota Palembang pada objek retribusi daerah. Beberapa objek retribusi daerah yang dihapus maupun diganti namanya. Penghapusan dan penggantian nama objek retribusi daerah ini dilakukan mengacu rancangan undang-undang pajak dan retribusi daerah. Ketentuan ini ditetapkan supaya iklim investasi dapat berkembang.<sup>7</sup> Perbedaan penelitian Rita Martini, Septian Bagus Pambudi, M.Husni Mubarak, dengan peneliti adalah penelitian Rita Martini, Septian Bagus Pambudi, M.Husni Mubarak membahas tentang retribusi daerah di Kota Palembang sedangkan peneliti membahas tentang Retribusi Pariwisata di Kabupaten Pinrang.
5. Verdi Payung Tappi, dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak daerah di Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah 1,05 dengan tingkat signifikansi 0,102 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak signifikan artinya bahwa ada hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah tapi tidak signifikan, hal ini searah dengan hipotesis dalam penelitian ini.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian Verdi Payung Tappi dengan peneliti adalah penelitian Verdi Payung Tappi berfokus pada

---

<sup>7</sup> Rita Martini, Septian Bagus Pambudi, and M Husni Mubarak, “Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang” 2, no. 1 (2019).

<sup>8</sup> Verdi Payung Tappi, “Analisis Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Jayapura’ Jurnal Ekonomi & Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura” 12 (2021): h.16–24.

Pajak hotel, Pajak restaurant, Pajak daerah, dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan peneliti berfokus pada Retribusi Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah.

6. Dwi Rahayu, dengan judul “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Restoran, Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2018”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak restoran dan retribusi objek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah kunjungan wisatawan dan pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan retribusi objek wisata tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan penelitian Dwi Rahayu dengan peneliti adalah variabel penelitian yakni jumlah kunjungan wisatawan dan pajak restoran serta lokasi penelitian.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Desentralisasi Fiskal : Aspek Teori

Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi akan diwujudkan dengan memberikan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.<sup>9</sup>

Menurut teori ekonomi publik, fungsi ekonomi pemerintah terdiri dari 3 fungsi yaitu: (i) Fungsi alokasi, sangat terkait erat dengan kewenangan utama

---

<sup>9</sup> Proborini Hastuti, “Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia,” *Simposium Nasional Keuangan Negara* 1, no. 1 (2018): 784–99, <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>.

bagi pemerintah daerah karena menyangkut alokasi sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Alokasi kepada masyarakat tersebut terutama terhadap barang publik yang nilainya relatif sangat besar tetapi swasta tidak dapat menyediakan. (ii) Fungsi distribusi, peran pemerintah dalam perekonomian dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi (pendapatan) kepada seluruh masyarakat. Fungsi distribusi ini memiliki keterkaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara proporsional dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal. (iii) Fungsi stabilisasi, dimana peran pemerintah dalam menjamin dan menjaga stabilisasi perekonomian secara makro (agregat) misalnya mengendalikan laju inflasi, keseimbangan neraca pembayaran, pertumbuhan dan lain-lain. Oleh karena itu fungsi ini berkaitan erat dengan fungsi variabel ekonomi makro dengan berbagai instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.<sup>10</sup>

Ditinjau dari cara penyediaannya, barang publik dapat dibedakan barang lokal (local public goods) dan barang publik nasional (national public goods). Jadi muncul suatu kondisi yang mengharuskan pembagian kerja antar strata pemerintahan tentang “siapa mengerjakan apa”. Konsep desentralisasi fiskal dengan demikian seperti dirumuskan oleh Demello adalah dimaksudkan untuk memindahkan atau menyerahkan sumber-sumber pendapatan dan faktor-faktor pengeluaran ke daerah dengan mengurangi birokrasi pemerintahan. Dengan membawa pemerintah lebih dekat ke masyarakat, desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong efisiensi sektor publik, juga akuntabilitas publik dan transparansi dalam penyediaan jasa publik serta pembuatan keputusan yang transparan dan demokratis.

Berbagai kajian dampak desentralisasi terhadap perekonomian dan public services delivery dapat dijelaskan dalam kerangka teori fiskal federalism. Teori ini dibagi dalam dua perspektif, yaitu teori tradisional atau

---

<sup>10</sup> Michael J. Boskin, *Fiscal Policy for Economic Growth, Economists' Voice*, vol. 9, 2012, <https://doi.org/10.1515/1553-3832.1898>.

teori generasi pertama (First Generation Theories) dan teori perspektif baru atau teori generasi kedua (Second Generation Theories). Dalam pandangan teori generasi pertama terdapat dua pendapat yang menekankan keuntungan alokatif desentralisasi.

Pertama, adalah tentang penggunaan *knowledge in society*, yang menurut Hayek proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya. Dalam konteks keuangan publik, pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih baik dibanding pemerintah pusat tentang kondisi daerah masing-masing, sehingga pemerintah daerah akan lebih baik dalam pengambilan keputusan penyediaan barang dan jasa publik dibanding penyediaan hal tersebut oleh pemerintah pusat. Keadaan ini disebut *allocative efficiency*. Kedua, Tiebout memperkenalkan dimensi persaingan dalam pemerintah dan kompetisi antar daerah tentang alokasi pengeluaran *public* memungkinkan masyarakat memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan selera dan keinginan mereka. Hal ini tidak terjadi jika pemerintah pusat sebagai penyedia barang dan jasa publik yang seragam. Perhatian teori ini tidak menekankan pada kemampuan pemerintah daerah untuk *self financing* dalam membiayai pengeluaran. Pola ini sama dengan definisi devolusi pada desentralisasi administratif.

Selanjutnya dalam pandangan teori generasi kedua yang dibangun oleh Musgrave lebih menekankan pentingnya *revenue and expenditure assignment* antar level pemerintahan. Teori ini menjelaskan bagaimana desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap perilaku pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat peraturan tentang ekonomi lokal, maka campur tangan pemerintah pusat dalam perekonomian daerah dibatasi. Dengan demikian teori generasi kedua ini mendasarkan pada 2 mekanisme dalam menyelaraskan antara kepentingan pemerintah daerah dengan

kemakmuran ekonomi, interaksi horisontal antar pemerintah daerah, interaksi vertikal antar level pemerintahan.

Mekanisme tersebut adalah dalam keadaan pasar barang dan jasa mobilitasnya tinggi, kompetisi antar pemerintah daerah merupakan alat insentif yang penting bagi penyediaan jasa- jasa publik. Persaingan antar pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada pasar akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebaliknya jika peraturan pemerintah daerah dan penyediaan barang/jasa publik tidak bersahabat dengan pasar dan masyarakat, maka akan menimbulkan mobilitas faktor produksi ke daerah lain dan selanjutnya akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Keterkaitan yang erat antara penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah juga menjadi insentif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi daerah. Dengan demikian transfer dari pemerintah pusat yang besar akan menimbulkan disinsentif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah. Dengan demikian perbedaan pokok kedua teori tersebut adalah terletak pada pandangan revenue transfer. Keterkaitan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah serta pembatasan redistribusi pemerintah pusat kepada daerah akan menciptakan insentif bagi pemerintah daerah dalam melakukan reformasi orientasi pasar.

## **2. Retribusi**

### **a. Pengertian retribusi**

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai belanja negara adalah retribusi. Oleh karena itu perlu dijelaskan pengertian retribusi yang dapat

diartikan sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemda/pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya atas peraturan yang berlaku.

Retribusi Pariwisata adalah retribusi yang dipungut dari local pariwisata atas penggunaan fasilitas pariwisata dan pemberian izin penempatan dagang oleh pemerintah kabupaten/kota. Retribusi Pariwisata terdiri dari retribusi pengunjung, izin penempatan lokasi dagang, dan retribusi tempat parkir dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari objek pariwisata tersebut.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Ahmad Yani., 2002). Pengertian Retribusi Daerah selanjutnya disebut dengan Retribusi sesuai Undang-undang PDRB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemberian Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan. Pemungutan Retribusi ini juga memperhatikan objek dan subjek Retribusi seperti halnya Pungutan Pajak Daerah. Seperti halnya pajak daerah, retribusi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menentukan bahwa objek 16 retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh

pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa tertentu yang merupakan pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi.<sup>11</sup> Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, maka diketahui bahwa sumber-sumber retribusi daerah adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi penggantian cetak penduduk dan akte sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir, retribusi pemakaian kekayaan daerah, terminal, pasar, rekreasi, penjualan produksi usaha dan retribusi perizinan bangunan.

Empat prinsip umum yang digunakan sebagai indikator dalam peneilaian retribusi yaitu sebagai berikut :<sup>12</sup>

1) Kecukupan

Retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk melakukan rasionalisme permintaan dari konsumen. Tanpa adanya harga maka permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak akan mencapai titik keseimbangan yang akibatnya tidak dapat menciptakan alokasi sumber daya yang efisien. Dengan diterapkannya retribusi maka setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya untuk membayar.

2) Keadilan

Kriteria kedua adalah keadilan. Penetapan harga layanan atau tarif retribusi, harus menerapkan prinsip keadilan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing

---

<sup>11</sup> Novia Sasmita, "Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Periode 2009-2018 Skripsi Novia Sasmita Jurusan Ekonomi Pembangunan," 2019.

<sup>12</sup> Kesit Bambang Prakosa, *Pajak Dan Retribusi Daerah* (UII Press, 2005). h.45.

golongan. Penerapan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah kemampuan membayar maka semakin rendah tarif yang dikenakan dibanding mereka yang memiliki kemampuan membayar lebih besar.

### 3) Kemudahan Administrasi

Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut, mudah ditaksir karena pertanggung jawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Hal ini terkait 21 dengan benefit Principle pada retribusi yang dikemukakan oleh Mc.Master (1991) yaitu retribusi dikenakan kepada individu dan atau kelompok yang menikmati manfaat barang atau jasa tersebut dengan pemakaian. Sebaliknya individu dan atau kelompok yang tidak menikmati dibebaskan dari kewajiban membayar.

### 4) Kesepakatan Politis

Retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan kesadaran yang cukup tinggi, sehingga didalamnya harus memuat kepastian hukum. Sehingga diperlukan suatu kemampuan politis dalam menetapkan retribusi, struktur tarif, memutuskan siapa yang membayar dan bagaimana memungut retribusinya.

Dalam memungut retribusi ada tiga sisi yang perlu diperhatikan:

- 1) Dari sisi wajib retribusi, biasanya wajib retribusi sering menghindar dari pungutan dengan cara menunda pembayaran dan berkeinginan membayar lebih kecil dari yang seharusnya dibayar.
- 2) Dari segi pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Dalam melaksanakan pungutan system dan prosedur administrasi sangat membantu karena

merupakan alat pengawasan terhadap pelaksana administrasi maupun wajib retribusi dalam menghindari kebocoran dan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pemungutan retribusi dalam mengefektifkan penerimaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu: melakukan konfirmasi data pada instansi terkait, penetapan tarif, penagihan retribusi perlu petugas yang disiplin waktu, penyetoran, pembukuan dan pelaporan.

- 3) Aparat pemungut/petugas, bagi petugas atau pemungut retribusi diperlukan mental dan sikap dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan tugas. Prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi harus diperhatikan agar retribusi dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Fisher berpendapat bahwa prinsip umum dari pemungutan retribusi adalah sebagai berikut;

- a. Pembiayaan retribusi meningkat sebagai akibat dari peningkatan keuntungan dan penggunaan langsung;
- b. Pembiayaan retribusi membutuhkan kondisi bahwa penggunaan langsung dapat dengan mudah diidentifikasi dan dikecualikan (pada biaya pantas) dari mengkonsumsi pelayanan kecuali apabila harga 20 dibayar dengan asumsi bahwa kebanyakan keuntungan dari sebuah pelaporan atau fasilitas yang diterima oleh pengguna barang;
- c. Pembiayaan retribusi lebih efisien ketika permintaan lebih elastis harganya;
- d. Margin keuntungan dan bukan total keuntungan sangat berpengaruh dalam menentukan retribusi.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 285 mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan menyebutkan bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah
  - a) Hasil Pajak Daerah
  - b) Hasil Retribusi Daerah
  - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- 2) Pendapatan transfer
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

**b. Jenis-Jenis Retribusi**

- a) Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.

Jenis-jenis retribusi jasa umum sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pelayanan kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, RSUD Daerah, dan tempat kesehatan lain sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan. Di dalamnya tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.

### 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

Objek retribusi jenis ini meliputi pelayanan kartu tanda penduduk, pelayanan kartu bertempat tinggal, pelayanan kartu identitas penduduk musiman, pelayanan kartu keluarga, pelayanan akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

### 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ini meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

### 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir untuk pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah

### 6) Retribusi Pelayanan Pasar

Objek retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa peralatan, los, kios, yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

### 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek Retribusi ini adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor untuk pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah.

#### 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek retribusi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penganggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat.

#### 9) Retribusi penggantian Biaya Cetak Peta

Objek dari retribusi ini adalah pelayanan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah

#### 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.

#### 11) Retribusi Penyedotan kakus

Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus untuk pemungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan Swasta.

#### 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi pelayanan tera/tera ulang untuk pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 13) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair

Pelayanan ini adalah pelayanan pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang dikelola dan/ atau dimiliki oleh

pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.<sup>13</sup>

#### 14) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pelayanan atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.

#### 15) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

#### 16) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas pelayanan atas penggunaan ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan tertentu.<sup>14</sup>

### b) **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial baik itu pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa ini<sup>15</sup>. Jenis retribusi umum dimaksud dapat juga tidak dipungut bila ternyata potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk membelikan pelayanan secara cuma-cuma.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

#### 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta dan pemakaian kendaraan/ alat-alat berat/ alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk

<sup>13</sup> Darwin, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2010).

<sup>14</sup> Fajar Billy Sandi, "Retribusi Daerah: Pengertian, Jenis, Tarif, Dan Bedanya Dari Pajak Daerah," 2019, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah>.

<sup>15</sup> Prakosa, *Pajak Dan Retribusi Daerah*.

dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari rumah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/ telepon maupun penanaman/ pembentangan kabel listrik/ telepon di tepi jalan umum.

#### 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan untuk pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan swasta.

#### 3) Retribusi Tempat Pelelangan

Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Tidak termasuk tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### 4) Retribusi Terminal

Retribusi terminal untuk pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan swasta.

#### 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh

pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa untuk pungutan atas pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang dimiliki dan dikelola oleh daerah kecuali yang dimiliki dan dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta.<sup>16</sup>

7) Retribusi Rumah Potong Hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah. Kecuali, yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

8) Retribusi Pelayanan Kepelabuan

Retribusi pelayanan kepelabuan untuk pungutan atas pelayanan jasa kepelabuan yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah.

9) Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah. Tidak termasuk tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

10) Retribusi Penyeberangan Di Atas Air

Pelayanan ini adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh

---

<sup>16</sup> Sandi, "Retribusi Daerah: Pengertian, Jenis, Tarif, Dan Bedanya Dari Pajak Daerah."

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

#### 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Penjualan produk si usaha daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, antara lain: bibit/ benih tanaman, bibit ternak dan bibit/ benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dan pihak swasta.<sup>17</sup>

#### c. Retribusi Perizinan Tertentu

Sebagai objek retribusi perizinan tertentu ini yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau pribadi yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>18</sup>

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

##### 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

<sup>17</sup> Darwin, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2010).

<sup>18</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, n.d.

## 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

## 3) Retribusi Izin Gangguan

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau gangguan. Tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

## 4) Retribusi Izin Trayek

Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah<sup>19</sup>.

### d. Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Subjek retribusi jasa umum adalah orang atau pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
- b) Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c) Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintahan Daerah.

---

<sup>19</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

#### e. Pemanfaatan Retribusi

Pada dasarnya pemungutan retribusi memiliki fungsi pokok yang hampir sama dengan pajak yaitu sebagai sumber anggaran, stabilitas ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat. Retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah memiliki fungsi sebagai anggaran untuk membiayai segala kebutuhan rutin pemerintahan maupun pembangunan daerah. Ketika sumber anggaran suatu daerah tercukupi, segala kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Retribusi bisa berfungsi sebagai stabilitas ekonomi daerah salah satunya untuk mengontrol harga pasar dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kesenjangan ekonomi penduduk.

### 3. Pariwisata

#### a. Pengertian Pariwisata

Kata “pariwisata” berasal dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali dan berputas-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau berpergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling.<sup>20</sup> Pariwisata adalah padanan bahasa Indonesia untuk istilah *tourism* dalam bahasa Inggris.

Menurut Hunziker dan Krapf dalam Soekadji, pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di situ untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Gamal pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seorang atau lebih menuju ketempat lain di luar

<sup>20</sup> Faisal Zulmi, “Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah,” 2018, 24.

<sup>21</sup> Liga Suryadana dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata* (Bandung: Alfabeta, 2015).

tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan baik karena kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain.

Disamping itu berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Nasional pariwisata mendapatkan penugasan baru untuk turut mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan memulihkan citra Indonesia di dunia internasional.

Wisata syariah dapat didefinisikan sebagai, “upaya perjalanan atau rekreasi untuk mencari kebahagiaan yang tidak bertentangan dan menyalahi prinsip-prinsip ajaran Islam, serta sejak awal diniatkan untuk mengagumi kebesaran ciptaan Allah.

#### **b. Bentuk-Bentuk Pariwisata**

Adapun bentuk-bentuk pariwisata yang dikategorikan berdasarkan:

##### **a) Menurut asal wisatawan**

Bentuk pariwisata menurut asal wisatawan dibagi menjadi dua jenis yaitu pariwisata dalam negeri dan pariwisata luar negeri. Pariwisata dalam negeri atau pariwisata domestik adalah perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam lingkungan di wilayah negaranya sendiri. Sedangkan pariwisata internasional atau pariwisata luar negeri adalah sebuah perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang antar negara atau di luar negara asalnya.

##### **b) Menurut Pengangkutan**

Yang dimaksud sebagai pengangkutan berupa alat pengangkutan yang digunakan wisatawan yang dikategorikan dalam pariwisata udara, laut, kereta api, mobil, dan lain-lain. Alat angkut yang dipilih tentunya bergantung kepada kondisi finansial wisatawan dan juga pada kondisi kesehatannya.

c) Menurut Jangka Waktu

Kedatangan dari seseorang atau sekelompok wisatawan di suatu negara akan diperhitungkan menurut lamanya sekelompok atau seseorang itu tinggal di negara tujuan. Hal ini memunculkan istilah pariwisata jangka panjang dan jangka pendek.

d) Menurut Jumlah Wisatawan

Menurut jumlah wisatawan ini maksudnya adalah perbedaan jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu Negara, dilakukan perseorangan atau sekelompok. Hal ini juga memunculkan istilah pariwisata tunggal maupun pariwisata kelompok.<sup>22</sup>

**c. Objek Pariwisata**

Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan wisatawan karena mempunyai sumberdaya baik alamiah maupun buatan manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai flora dan fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, candi-candi, tari-tarian, atraksi dan kebudayaan khas lainnya.<sup>23</sup>

Menurut Sutrisno, mengatakan ketika banyaknya jumlah objek wisata yang ada maka akan berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata, baik melalui pajak daerah maupun retribusi daerah. Menurut Yoeti Objek Harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Tiap daerah harus mempunyai apa yang disebut sebagai something to see (sesuatu untuk dilihat). Artinya, di tempat tersebut harus ada objek wisata yang bisa dilihat dan dinikmati, serta berbeda dengan tempat wisata lainnya. (Zulmi t.thn.) (M Liga Suryadana 2015)

<sup>22</sup> I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Wdyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata* (Bali: Pustaka Larasan, 2017).

<sup>23</sup> Hugo Itamar; A. Samsu Alam; Rahmatullah, "Strategi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Tana Toraja," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 2 (2014): h.13.

- b. Tiap daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut *something to do* (sesuatu untuk dikerjakan). Artinya, bagi para wisatawan ketika mengunjungi tempat tersebut dalam melakukan banyak kegiatan yang tidak bisa mereka lakukan pada tempat lainnya.
- c. Tiap daerah harus tersedia apa yang disebut *something to buy* (sesuatu yang bisa dibeli). Artinya, bagi para wisatawan dapat membeli sesuatu yang khas berupa cinderamata di daerah tersebut. Dan tidak bisa mereka dapatkan pada tempat lainnya.<sup>24</sup>

#### d. Jenis-Jenis Pariwisata

Pariwisata meliputi berbagai jenis, karena keperluan dan motif perjalanan wisata yang dilakukan bermacam-macam. Jenis-jenis pariwisata sebagai berikut:

##### a) Pariwisata Pantai (*Marine Tourisme*)

Merupakan kegiatan pariwisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.

##### b) Pariwisata Etnik (*Etnic Tourism*)

Merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.

##### c) Pariwisata Cagar Alam (*Ecotourism*)

Merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara dipegunungan, keajaiban hidup binatang (margasatwa) yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat ditempat-tempat lain.

<sup>24</sup> Faisal Zulmi, "Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah."

d) Pariwisata Buru

Merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.

e) Pariwisata Agro (Agro Tourism / Rural Tourism / Farm Tourism)

Merupakan jenis wisata yang mengorganisasikan perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan ladang pembibitan dimana wisata rombongan dapat mengadakan kunjungan dan tinjauan untuk tujuan studi maupun menikmati segarnya tanaman sekitarnya.<sup>25</sup>

f) Pariwisata Budaya (Culture Tourism)

Pariwisata budaya adalah perjalanan untuk meresapi (dan terkadang untuk ikut mengalami) suatu gaya hidup yang telah hilang dari ingatan manusia.

g) Pariwisata Rekreasi (Recreational Tourism)

Pariwisata rekreasi adalah kegiatan wisata yang berkisar pada olahraga, menghilangkan ketegangan dan melakukan kontak sosial dalam suasana yang santai.

h) Pariwisata Kota (City Tourism)

Pariwisata kota adalah perjalanan dalam suatu kota untuk melihat/ mempelajari/ menikmati objek, sejarah dan daya tarik yang terdapat di kota tersebut.

i) Pariwisata Perkotaan (Urban Tourism)

Pariwisata perkotaan adalah bentuk pariwisata yang umum terjadi di kota-kota besar, di mana pariwisata merupakan kegiatan yang cukup penting, namun bukan merupakan kegiatan utama di kota tersebut.

---

<sup>25</sup> M. Liga Suryadana dan Vanny Octavis, *Pengantar Pemasaran Pariwisata* (Bandung: Alfabeta, 2015).

j) Pariwisata Sosial (Social Tourism)

Pariwisata sosial merupakan pendekatan untuk menyelenggarakan liburan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta orang-orang yang tidak memiliki inisiatif untuk melakukan perjalanan serta orang-orang yang belum mengerti bagaimana cara mengatur suatu perjalanan wisata.

k) Pariwisata Alternatif (Alternative Tourism)

Pariwisata alternatif merupakan suatu bentuk pariwisata yang sengaja disusun dalam skala kecil, memperhatikan kelestarian lingkungan dan segi-segi sosial. Bentuk pariwisata ini sengaja diciptakan sebagai tantangan terhadap bentuk pariwisata yang umumnya berskala besar. Dalam pariwisata alternatif ini keuntungan ekonomi diperoleh dari kegiatan pariwisata langsung dirasakan oleh masyarakat setempat sebagai pemilik dan penyelenggara jasa pelayanan dan fasilitas pariwisata.<sup>26</sup>

#### 4. Pendapatan Asli Daerah

##### a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi.

---

<sup>26</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

Dalam undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa :

Pendapatan Daerah bersumber dari:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah termasuk sumber keuangan pokok bagi daerah di samping retribusi daerah. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang berguna untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang prestasinya kembali, tidak dapat ditunjuk secara langsung tetapi pelaksanaannya dapat dipaksakan. Sedangkan pajak daerah itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Pajak daerah dapat dijelaskan menurut wilayah kekuasaan bagi pihak pemungutnya. Berikut penjelasan mengenai wilayah pemungutan pajak daerah :

a) Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi, sebagai berikut:

1. Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kendaraan di atas air
2. Biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (P3ABTAP).

b) Pajak Kabupaten atau Kota:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan bahan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walis
10. Pajak bumi, pedesaan, dan perkotaan
11. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2) Hasil retribusi daerah

Retribusi merupakan iuran dari masyarakat tertentu (orang-orang tertentu) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang prestasinya dikembalikan ditunjuk secara langsung, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan meskipun tidak mutlak. Retribusi dibagi tiga golongan,<sup>18</sup> diantaranya retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.<sup>27</sup>

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

Pemerintah daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatannya, yang disebut perusahaan daerah (Perusda). Prinsip pengelolaan daerah haruslah bersifat profesional dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi secara umum yaitu efisien. Secara umum perusahaan daerah merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk

<sup>27</sup> Chabib Soleh dan heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah* (Bandung: Fokusmedia, 2010).

memperkembangkan perekonomian dan untuk menambah penghasilan daerah. Jadi, tergambar dua fungsi pokok yaitu sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan bagi berkembangnya perekonomian daerah dan sebagai penghasil pendapatan daerah.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.<sup>28</sup>

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor-impor. Yang dimaksud tentang peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek objek yang dikenakan Pajak Pusat dan Provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Oleh karena itu, perolehan PAD, retribusi, maupun pendapatan-pendapatan lainnya serta dana perimbangan yang dapat bervariasi antar daerah-daerah di Indonesia tersebut, diperlukan manajemen pemanfaatan dana yang mampu digunakan semaksimal mungkin bagi kemakmuran

---

<sup>28</sup> Arraniry, "Analisi Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat."

masyarakat yang sebesar-besarnya melalui program dan kegiatan-kegiatan yang diluncurkan pemerintah daerah tersebut.<sup>29</sup>

Secara tidak langsung, pariwisata memberikan kontribusi signifikan kepada pendapatan asli daerah (PAD) suatu daerah dan tentu saja pemasukan devisa bagi suatu Negara. Usaha daerah seperti pengembangan sektor pariwisata yang nantinya menghasilkan kontribusi terhadap pendapatan daerah harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, kabupaten/kota melakukan berbagai upaya terobosan dalam peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah, karena faktor dana sangat menentukan lancar tidaknya suatu pemerintahan daerah. Pelayanan kepada masyarakat akan terlambat akibat terbatasnya kemampuan dalam bidang pendanaan. Dengan terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah tidak banyak yang dapat dilakukan dalam memberikan pelayanan maupun kemudahan bagi masyarakat.

#### **b. Peran Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan peningkatannya.

Industri pariwisata di Indonesia dinilai sebagai sektor andalan penyumbang devisa Negara terbesar dalam bidang non migas. Terlebih ketika pemerintah Indonesia mencanangkan program otonomi daerah, maka industri pariwisata merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan daerah. Adalah suatu langkah jitu jika industri pariwisata dipergunakan oleh daerah-daerah di Indonesia yang miskin akan sumber daya alam sebagai suatu sarana untuk meningkatkan PAD. Namun sebagai konsekuensinya, daerah-daerah tersebut harus melakukan pengembangan-pengembangan terhadap potensi-

---

<sup>29</sup> Susanto Dkk, *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2010).

potensi pariwisata masing-masing daerah dengan mencari dan menciptakan peluang-peluang baru terhadap produk-produk pariwisata yang diunggulkan. Yang perlu mendapat perhatian bahwa pengembangan industri pariwisata daerah terkait dengan berbagai faktor yang mau tidak mau berpengaruh dalam perkembangannya. Oleh karena itu perlu diketahui dan dipahami apa saja faktor yang sesuai faktual memegang peranan penting dalam pengembangan industri pariwisata daerah khususnya dalam rangka penerapan otonomi daerah, sehingga pada akhirnya pengembangan industri pariwisata daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan PAD dan mendorong program pembangunan daerah.

Pada dasarnya pengembangan industri pariwisata suatu daerah berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian daerah tersebut. Dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat daerah setempat adalah adanya perluasan lapangan kerja secara regional. Ini merupakan akibat dari industri pariwisata yang berkembang dengan baik. Misalnya, dengan dibangunnya sarana dan prasarana di daerah tersebut maka tenaga kerja akan banyak tersedot dalam proyek-proyek seperti pembangkit tenaga listrik, jembatan, perhotelan dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

### C. Kerangka Pemikiran

Pariwisata mampu memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi, baik secara mikro, meso, makro. Dampak mikro antara lain peningkatan pendapatan masyarakat atau variasi kegiatan ekonomi bertambah. Peningkatan PAD, pembukaan lapangan pekerjaan merupakan dampak di lingkup meso. Dampak makro nya adalah pertumbuhan ekonomi dan PDRB wilayah. Perkembangan

---

<sup>30</sup> Ni Luh Sili Antari, "Peran Industri Pariwisata Terhadap Penerimaan Asli Daerah Gianyar," *Jurnal Perhotelan Dan Pariwisata* 3 (2013): 36–37.

kegiatan wisata di Kabupaten Pinrang diharapkan mempunyai dampak terhadap ekonomi wilayah.

Menurut United Nations World Tourism Organization (UNWTO), alasan sektor pariwisata berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain :

- a. Pariwisata merupakan kesempatan terutama bagi daerah marjinal dengan beberap ekspor pilihannya. Wisatawan yang tertarik dengan nilai-nilai budaya dan aset yang ada di negara tersebut, misalnya budaya di negara-negara berkembang menggalakkan pariwisata melalui pelestarian nilai-nilai warisan. Sehingga, memungkinkan masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya melalui budaya dan aset yang dimiliki.
- b. Pariwisata salah satu sektor ekspor yang mana masyarakat miskin di suatu negara dapat menjadi eksportir melalui penjualan barang kepada wisatawan asing.

Dengan demikian kerangka pemikiran PENGARUH RETRIBUSI OBJEK WISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH di Kabupaten Pinrang dapat digambarkan sebagai berikut:



#### D. Hipotesis Penelitian

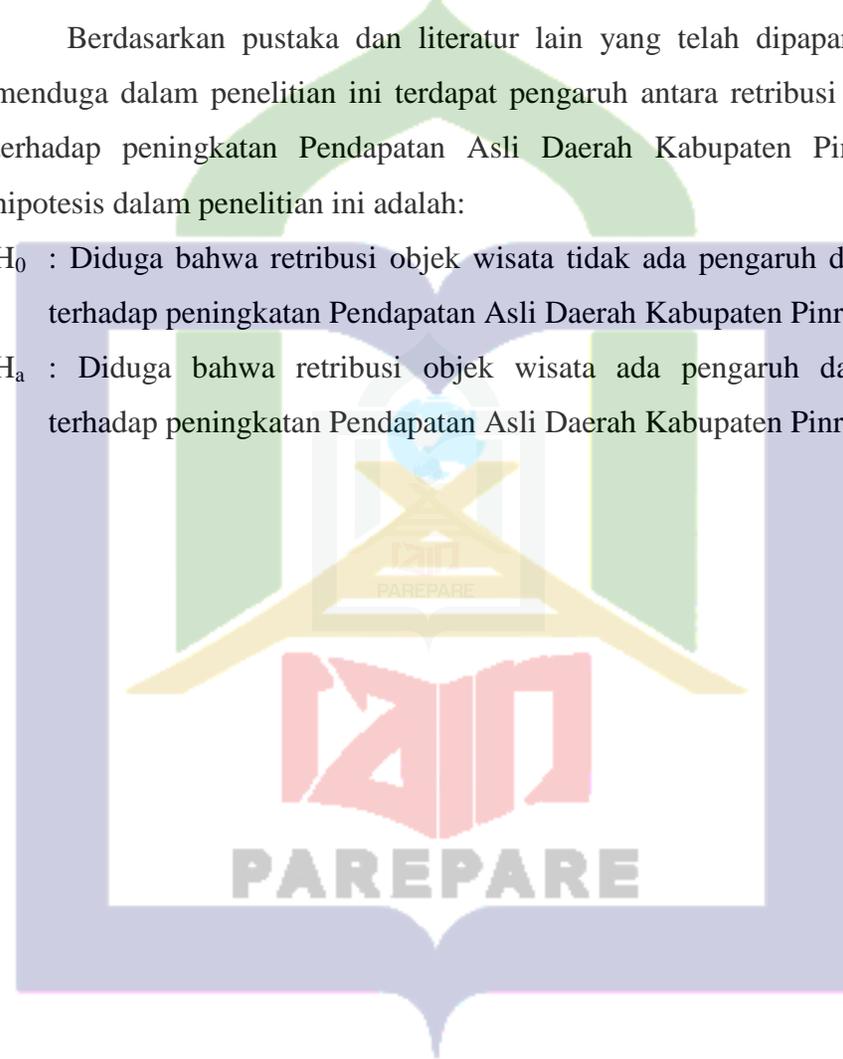
Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Hipotesis dapat didukasi dari proposisi lainnya yang tingkat keberlakuannya lebih universal. Oleh karena itu, hipotesis merupakan

hasil pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori dalil hukum dan sebagainya yang sudah ada sebelumnya. Hipotesis dapat juga berupa pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu antara dua variabel atau lebih, yang kebenaran hubungan tersebut tunduk pada peluang untuk menyimpang dari kebenaran.<sup>31</sup>

Berdasarkan pustaka dan literatur lain yang telah dipaparkan, penulis menduga dalam penelitian ini terdapat pengaruh antara retribusi objek wisata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_0$  : Diduga bahwa retribusi objek wisata tidak ada pengaruh dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang

$H_a$  : Diduga bahwa retribusi objek wisata ada pengaruh dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang



---

<sup>31</sup> Anwar sanusi, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Bersifat kuantitatif karena dalam pelaksanaannya meliputi data yang berupa angka, atau data berupa kata-kata atau kalimat atau kalimat yang dikonversi menjadi data yang berbentuk angka. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut, Data Deskriptif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata, gambar dan angka-angka. Karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh.<sup>32</sup>

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang berjudul “PENGARUH RETRIBUSI OBJEK WISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PINRANG” dilaksanakan di kantor BPKPD Kabupaten Pinrang. Peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 1 bulan sejak proposal ini diterima yang dimana kegiatannya meliputi: persiapan (pengajuan proposal), pelaksanaan (pengumpulan data), dan penyusunan hasil penelitian.

#### C. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan.<sup>33</sup> Populasi yang digunakan dalam penelitian terdiri dari laporan PAD Kabupaten Pinrang tahun 2018-2022.

---

<sup>32</sup> M Taufik Maskur Makkawaru, *Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Buntu Burake Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja, Kaos GL Dergisi*, vol. 8, 2020.

<sup>33</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti).<sup>34</sup> Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan retribusi objek wisata tahun 2018-2022.

### D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh peneliti dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari instansi terkait seperti BPKPD Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, jurnal dan buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### E. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat/nilai dari orang/objek atau kegiatan yang mempunyai variasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Penelitian ini terdapat variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat), sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel independen (bebas).<sup>35</sup> Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variabel independennya adalah Kontribusi Objek Wisata.

#### 1. Retribusi Objek Wisata (X)

Objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Agar objek wisata dapat mendatangkan wisatawan objek wisata harus dikelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Pendapatan objek pariwisata adalah merupakan sumber penerimaan yang berasal dari

---

<sup>34</sup> Suharyadi, *Statistika Dan Keuangan Modern* (Yogyakarta: Salemba Empat, 2013).

<sup>35</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).

retribusi karcis masuk, retribusi parkir, dan pendapatan yang sah yang berasal dari objek pariwisata.

Data mengenai objek wisata diperoleh dari laporan objek wisata yang diperoleh dari BPKPD Kabupaten Pinrang.

## 2. Pendapatan asli Daerah (Y)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

Data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari laporan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah, data tersebut diperoleh dari BPKPD Kabupaten Pinrang yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya menjadi lebih mudah dan baik, dalam arti lebih cermat, lengkap sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah.<sup>36</sup> Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari BPKPD Kabupaten Pinrang.

## G. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode deskriptif kuantitatif, dimana analisis data penelitian ini merupakan bagian dari proses pengujian data

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data dalam penelitian. Beberapa teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini, antara lain:

### 1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif lebih berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data, serta panyajian hasil peringkasan tersebut.<sup>37</sup>

### 2. Analisis Kontribusi

Digunakan untuk melihat besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang. Dengan mengetahui jumlah kontribusi, diharapkan pemerintah bisa menganalisis besarnya potensi sektor pariwisata untuk tahun kedepannya. Sedangkan untuk menghitung kontribusi sektor pariwisata adalah sebagai berikut:

#### **Rumus Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD**

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Objek Wisata}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

Kontribusi : Persentase retribusi pariwisata terhadap total PAD

Retribusi Pariwisata : Besarnya retribusi pariwisata dalam tahun (n)

Total PAD : Total PAD tahun (n)

<sup>37</sup> Singgih Santoso, *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999).h.68

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi objek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah.<sup>38</sup>

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Pada dasarnya, uji normalitas adalah membandingkan antara data yang kita miliki dan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Uji normalitas menjadi hal penting karena salah satu syarat pengujian parametric-test (Uji parametrik) adalah data harus memiliki distribusi normal (atau berdistribusi normal).<sup>39</sup>

Selain itu dapat menggunakan uji statistic yang dapat digunakan diantaranya adalah *Kolmogorov Smirnov*, *Liliefors*, *Shapiro Wilk*, *Chi Square*. Peneliti menggunakan uji statistic non-parametric *kolmogorov-smirnov* (K-S) dengan ketentuan:

- 1). Jika nilai sig > 0,05 maka data terdistribusi normal
- 2). Jika nilai sig < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal.

#### b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan/observasi. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji statistik yang digunakan adalah Uji Scatterplot. Uji Scatterplot digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara lain nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat

<sup>38</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2004).

<sup>39</sup> Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, *SPSS vs LISREL : Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di studentized. Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik Uji Scatterplot adalah jika ada pola seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

### 3. Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana berguna untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan independen, di mana jumlah variabel independen hanya satu. Skala pengukuran data untuk variabel dependen adalah variabel interval atau rasio.<sup>40</sup> Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Secara matematis model analisis regresi linear sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen

X = Variabel independen

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

e = Standar error

---

<sup>40</sup> Sofyan Yamin dkk, *Regresi Dan Korelasi Dalam Genggaman Anda : Aplikasi Dengan Software SPSS, Eviews, MINITAB, Dan STATGRAPHICS* (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

## 5. Uji Hipotesis Penelitian

### a. Uji Parsial ( Uji T)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.<sup>41</sup> Uji t merupakan suatu cara untuk mengatur apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Dalam pengujian ini menggunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai signifikan  $\leq 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan.

### b. Uji Korelasi Pearson Product Moment

Teknik korelasi *product moment* digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama.<sup>42</sup> Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Keterangan :

$r_{xy}$  = Korelasi antara variabel X dan Y

$x = (X_i - \bar{X})$

$y = (Y_i - \bar{Y})$

$X_i$  = Nilai variabel X

<sup>41</sup>Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Keempat*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h. 84.

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 228.

$\bar{X}$  = Rata-rata nilai variabel X

$Y_i$  = Nilai variabel Y

$\bar{Y}$  = Rata-rata nilai variabel Y

Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya hubungan antar variabel, maka dapat menggunakan pedoman sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Interpretasi Hubungan Antar Variabel**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,800 – 1,000	Sangat Kuat
0,600 – 0,799	Kuat
0,400 – 0,599	Sedang
0,200 – 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pinrang adalah untuk mengetahui pengaruh retribusi objek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2018-2022. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah daftar realisasi Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya memuat data-data target dan daftar realisasi retribusi objek wisata

#### 1. Data Retribusi Objek Wisata

Objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Agar objek wisata dapat mendatangkan wisatawan objek wisata harus dikelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Pendapatan objek pariwisata adalah merupakan sumber penerimaan yang berasal dari retribusi karcis masuk, retribusi parkir, dan pendapatan yang sah yang berasal dari objek pariwisata. Indonesia sebagai negara yang memiliki keindahan alam serta keanekaragaman budaya yang mempunyai kesempatan untuk menjual keindahan alam dan atraksi budaya kepada wisatawan mancanegara maupun nusantara yang akan menikmati keindahan alam dan budaya tersebut. Tentu saja kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya.

Bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar negeri, kedatangan mereka akan mendatangkan Objek wisata merupakan daerah atau kawasan yang menjadi tujuan pariwisata yang di dalamnya terdapat keindahan dan keunikan yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah wisata. Untuk memberikan kepuasan yang tinggi terhadap wisatawan, maka objek wisata harus dirancang dan dibangun secara profesional

berdasarkan potensi daerah wisata tersebut devisa dalam negara, Salah satunya objek wisata yang ada di Kabupaten Pinrang.

Data yang diperoleh dari BPKPD Kabupaten Pinrang mengenai target dan realisasi Retribusi Objek wisata Kabupaten Pinrang dari tahun 2018-2022 sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Objek Wisata Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022**

Tahun	Target	Realisasi
2018	250.000.000	188.130.000
2019	250.000.000	215.395.000
2020	250.000.000	92.100.000
2021	250.000.000	141.395.000
2022	250.000.000	174.540.000

*Sumber Data: BPKPD Kabupaten Pinrang*

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa retribusi objek wisata dari tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 berjumlah 188.130.000, kemudian ditahun 2019 mengalami kenaikan berjumlah 215.395.000, ditahun berikutnya pada 2020 mengalami penurunan yaitu berjumlah 92.100.000, kemudian di tahun berikutnya 2021 kembali mengalami kenaikan berjumlah 141.395.000, dan ditahun 2022 mengalami kenaikan berjumlah 174.540.000.

## 2. Data Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang didapat daerah dan pemungutannya berdasarkan pada peraturan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam memberikan dana pelaksanaan pada otonomi daerah, disesuaikan pada potensi daerah dalam mewujudkan desentralisasi (Kementrian Keuangan). Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah itu sendiri, sumbernya di daerah pada wilayahnya sendiri, pemungutannya berdasarkan peraturan ataupun dalam perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena dengan sektor ini dapat

melihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Data yang diperoleh dari BPKPD Kabupaten Pinrang mengenai target dan realisasi Retribusi Objek wisata Kabupaten Pinrang dari tahun 2018-2022 sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022**

Tahun	Target	Realisasi
2018	125.995.857.430	130.651.467.245,38
2019	131.283.048.492	133.363.942.030,14
2020	125.849.979.824	131.174.527.320,35
2021	139.903.324.496	134.066.655.485,33
2022	147.850.939.510	158.121.561.743,63

*Sumber Data: BPKPD Kabupaten Pinrang*

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018-2020 juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 berjumlah 130.651.467.245,38, kemudian ditahun 2019 mengalami kenaikan berjumlah 133.363.942.030,14, ditahun berikutnya pada 2020 mengalami penurunan yaitu berjumlah 131.174.527.320,35, kemudian di tahun berikutnya 2021 kembali mengalami kenaikan berjumlah 134.066.655.485,33, dan ditahun 2022 mengalami kenaikan berjumlah 158.121.561.743,63.

### 3. Kontribusi Retribusi Objek Wisata Dalam Menunjang PAD

Untuk mengetahui kontribusi yang berasal dari penerimaan retribusi objek wisata dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 digunakan rumus sebagai berikut:

#### **Rumus Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD**

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Objek Wisata}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi retribusi objek wisata dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

#### a. Kontribusi retribusi objek wisata tahun 2018

$$2018 = \frac{188.130.000}{130.651.467.245,38} \times 100\% = 0,14\%$$

#### b. Kontribusi retribusi objek wisata tahun 2019

$$2019 = \frac{215.395.000}{133.363.942.030,14} \times 100\% = 0,16\%$$

c. Kontribusi retribusi objek wisata tahun 2020

$$2020 = \frac{92.100.000}{131.174.527.320,35} \times 100\% = 0,07\%$$

d. Kontribusi retribusi objek wisata tahun 2021

$$2021 = \frac{141.395.000}{134.066.655.485,33} \times 100\% = 0,10\%$$

e. Kontribusi retribusi objek wisata tahun 2022

$$2021 = \frac{174.540.000}{158.121.561.743,63} \times 100\% = 0,11\%$$

Tabel dibawah ini menjelaskan hasil perhitungan kontribusi retribusi objek wisata pantai dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah

**Tabel 4.3 Hasil Analisis Kontribusi Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022**

Tahun	Retribusi Objek Wisata (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2018	188.130.000	130.651.467.245,38	0,14
2019	215.395.000	133.363.942.030,14	0,16
2020	92.100.000	131.174.527.320,35	0,07
2021	141.395.000	134.066.655.485,33	0,10
2023	174.540.000	158.121.561.743,63	0,11

Dari tabel diatas maka diketahui bahwa kontribusi retribusi objek wisata dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah tahun 2018-2022 berkisar antara 0,07%-0,16% dari total Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2018 retribusi objek wisata memberikan kontribusi sebesar 0,14% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,16%, hal ini terjadi karena meningkatnya penerimaan retribusi objek wisata dalam tahun 2019 tersebut. Namun pada tahun 2020 kontribusi yang diberikan menurun menjadi 0,07% atau berkurang sebesar

0,09% dari tahun 2019, hal ini disebabkan karena adanya penurunan penerimaan retribusi objek wisata dalam tahun 2020 tersebut. Pada tahun 2021 kontribusi kembali naik sebesar 0,10% dibandingkan tahun 2020 hal ini terjadi seiring meningkatnya kembali penerimaan retribusi objek wisata. Dan untuk tahun 2022 kontribusi yang diberikan dari retribusi objek wisata adalah sebesar 0,11%, ini berarti kontribusi kembali naik dari kontribusi yang diberikan pada tahun 2021.

## B. Pengujian Dan Hasil Analisis Data

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah pengolahan data untuk tujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Dalam penelitian ini pengujian deskriptif yang digunakan adalah nilai maximum, nilai minimum, mean (rata-rata) dan standar deviasi. Hasil perhitungan dari statistik deskriptif dari masing-masing variabel sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Retribusi_Objek_Wisata	5	92100000.00	215395000.00	162312000.0000	47437179.0634
Pendapatan_AslilDaerah	5	130651467245.38	158121561743.63	137475630764.9660	11630291000.73191
Valid N (listwise)	5				

Sumber Data: Diolah SPSS (2023)

Tabel 4.4 menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penilaian. Berdasarkan tabel 4.4 hasil analisis menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel retribusi objek wisata (X) menunjukkan nilai minimum sebesar 92100000.00, nilai maksimum sebesar 215395000.00, dan *mean* (rata-rata) sebesar 162312000.0000 dengan standar deviasi sebesar 47437179.06347. Sedangkan untuk variabel pendapatan asli daerah (Y) menunjukkan nilai minimum sebesar 130651467245.38, nilai maksimum sebesar

158121561743.63, dan *mean* (rata-rata) sebesar 137475630764.9660 dengan standar deviasi sebesar 11630291000.73191.

## 2. Analisis Kontribusi

Hasil penelitian menggambarkan tentang hasil yang diperoleh dalam kuantitatif. Dalam penelitian ini juga termasuk data yang diperoleh yaitu retribusi objek wisata dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang. Hasil Analisis Kontribusi Retribusi Objek Wisata dibagi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang 2018 sampai tahun 2022 dengan hasil olahan sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Hasil Analisis Kontribusi Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022**

Tahun	Retribusi Objek Wisata (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2018	188.130.000	130.651.467.245,38	0,14
2019	215.395.000	133.363.942.030,14	0,16
2020	92.100.000	131.174.527.320,35	0,07
2021	141.395.000	134.066.655.485,33	0,10
2023	174.540.000	158.121.561.743,63	0,11

Berdasarkan Tabel 4.5 Dapat dijelaskan bahwa kontribusi Retribusi Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang hanya berkisar antara 0,7% sampai 0,16%. Pada tahun 2018 kontribusi objek wisata sebesar 0,14% terhadap PAD dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,16% sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,07% dan untuk tahun 2021 sebesar 0,10% sedangkan untuk tahun 2023 sebesar 0,11%.

## 3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menggunakan uji regresi berganda menggunakan uji asumsi klasik yang harus dipenuhi diantaranya adalah : Uji Normalitas dan Uji Heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya variabel pengganggu yang mempunyai distribusi normal dalam model regresi.<sup>43</sup> Hasil pengujian menunjukkan data berdistribusi normal, jika *probability value* > 0,05. Hasil pengolahan data uji normalitas dengan *One Sample Kolmogorov-Smirnov (KS)* sebagai berikut.

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-,0000107
	Std. Deviation	11464106329,06689500
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,388
	Absolute Negative	,388
	Positive	-,246
Kolmogorov-Smirnov Z		,867
Asymp. Sig. (2-tailed)		,439

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber Data: Diolah SPSS (2023)

Berdasarkan hasil uji normalitas yang terlihat dari Tabel 4.6 nilai *probability value* sebesar 0,439. Hasil tersebut menunjukkan nilai *probability value* > 0,05 atau 0,439 > 0,05. Jadi dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.

<sup>43</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016).

Dasar dari pengambilan keputusan yang terkait dengan scatterplot tersebut adalah:

- a.) Jika terdapat pola tertentu, yaitu jika titik-titik membentuk pola tertentu dan teratur (bergelombang, melebur, kemudian menyempit), maka terdapat heteroskedastisitas.
- b.) Jika tidak terdapat pola yang jelas, yaitu titik-titiknya menyebar serta berada dibawah angka Nol pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

Masalah heteroskedastisitas dapat diketahui dengan uji *statistic scatterplot*, hasil pengujiannya sebagai berikut:



Sumber Data: Diolah SPSS (2023)

Dari gambar diatas diketahui bahwa titik-titik (data) menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi Heteroskedastisitas.

### c. Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi atau menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi tidak lebih dari 5% atau 0,05, maka variabel bebas berpengaruh secara

signifikan terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	1307724555 38,689	2340801270 7,229		
Retribusi_Objek_Wisata	41,298	139,528	,168	,296	,787

*Sumber Data: Diolah SPSS (2023)*

Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 130772455538,689 + 41,298X$$

Maka koefisien b dinamakan arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan nilai b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negative. Sehingga dari persamaan tersebut dijelaskan:

1. Nilai Konstanta sebesar 130772455538,689 menyatakan bahwa jika retribusi daerah tidak mengalami peningkatan maupun penurunan (Bernilai Tetap) maka nilai Pendapatan Asli Daerah akan bernilai tetap sebesar 130772455538,689.
2. Koefisien regresi X sebesar 41,298 menyatakan bahwa jika retribusi objek wisata mengalami peningkatan sebesar 1 Rupiah maka nilai pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar 41,298.

### C. Pengujian Hipotesis

#### a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen. Hasil analisis uji parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial (Uji T)**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1307724555 38,689	2340801270 7,229		5,587 ,011
	Retribusi_Objek_Wisat a	41,298	139,528	,168	,296 ,787

Sumber Data: Diolah SPSS (2023)

Berdasarkan uji statistik t diperoleh nilai hitung t sebesar 0,296 dan nilai signifikan sebesar 0,787 lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,05 (5%), nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ( $0,787 > 0,05$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Retribusi Objek Wisata tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

#### b. Uji Korelasi Person Product Moment

Uji korelasi *pearson product moment* digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, dimana rentang nilai dari koefisien korelasi yang berkisar antara -1, 0, dan 1. Nilai -1 artinya terdapat korelasi negatif yang sempurna, 0 artinya tidak ada korelasi, dan nilai 1 artinya ada korelasi positif yang sempurna.

Tabel 4.10 Hasil Uji Korelasi Person Product Moment

		Retribusi Objek Wisata	PAD
Retribusi Objek Wisata	Pearson Correlation	1	,168
	Sig. (2-tailed)		,787
	N	5	5
PAD	Pearson Correlation	,168	1
	Sig. (2-tailed)	,787	
	N	5	5

Sumber Data: Diolah SPSS (2023)

Berdasarkan hasil pengujian korelasi *pearson product moment* yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *pearson correlation* sebesar 0,168. Jika dilihat berdasarkan tabel 3.1, maka variabel bebas terhadap variabel terikat tidak memiliki korelasi dengan derajat hubungan yaitu korelasi sangat rendah.

#### D. Pembahasan Hasil Penelitian

Peneliti telah melakukan beberapa pengujian yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pinrang.

##### 1. Analisis Kontribusi Objek Wisata Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang

Berdasarkan Tabel 4.5 Dapat dijelaskan bahwa kontribusi Retribusi Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang hanya berkisar antara 0,7% sampai 0,16%. Pada tahun 2018 kontribusi objek wisata sebesar 0,14% terhadap PAD dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,16% sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,07% dan untuk tahun 2021 sebesar 0,10% sedangkan untuk tahun 2023 sebesar 0,11%.

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, retribusi menjadi salah satu pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasikan pendapatan asli daerah. Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satu penyebab rendahnya kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah ialah masih banyaknya objek wisata yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Sehingga objek wisata kebanyakan tidak terkelola dengan baik, yang berakibat kurangnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata baik melalui parkir maupun biaya masuk objek wisata. Pengolahan penerimaan daerah setidaknya harus dikelola secara cermat, tepat dan penuh dengan kehati-hatian. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan tercatat di dalam sistem akuntansi Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki Sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Disamping hal tersebut, pemerintah daerah perlu meneliti adakah penerimaan yang tidak disetorkan ke dalam kas pemerintah daerah dan di salahgunakan oleh petugas di lapangan. Dan perlunya pula diteliti dengan saksama kepada masyarakat yang tidak membayar dan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya dengan tegas. Pemerintah daerah berinisiatif untuk mengelola objek wisata yang berpotensi memberikan kontribusi retribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah. Sehingga penerimaan retribusi pariwisata dapat meningkat serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah.

Beberapa faktor yang ikut mempengaruhi peningkatan Pendapatan Pariwisata dengan upaya pengenalan potensi-potensi budaya dan alam di daerah-daerah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya daerah Kabupaten Pinrang dilakukan dengan jalan melakukan promosi kepariwisataan. Saat ini dimana perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi demikian pesat maka diperkirakan akan terjadi persaingan di pasar global khususnya persaingan di bidang industri pariwisata. Oleh karenanya promosi kepariwisataan merupakan suatu strategi jitu yang harus dilakukan secara berkesinambungan baik di tingkat internasional maupun regional.. Faktor yang tak kalah pentingnya adalah Sarana dan Prasarana Kepariwisataan, motivasi yang mendorong orang untuk mengadakan perjalanan akan menimbulkan permintaan-permintaan yang sama mengenai prasarana dan sarana kepariwisataan seperti jaringan telekomunikasi, akomodasi dan lain sebagainya.

Dalam hal ini semua objek wisata yang ada di Kabupaten Pinrang dituntut kesiapannya atas penyediaan sarana dan prasarana kepariwisataan yang merupakan salah satu faktor penentu berhasilnya pengembangan sektor pariwisata. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan. Dengan demikian perlu adanya pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana wisata untuk mendukung penyelenggaraan pariwisata. Apabila pembenahan dan pengelolaan sarana prasarana kepariwisataan tidak dikelola dengan optimal maka akan berakibat pada tidak tercapainya dampak positif sektor pariwisata dalam upaya peningkatan PAD. Implikasi dari rendahnya penerimaan sektor pariwisata akan mempengaruhi jumlah penerimaan tenaga kerja dan jumlah pendapatan usaha menengah ke bawah. Secara otomatis, ketika tingkat pendapatan menurun maka pendapatan tingkat kesejahteraan masyarakat

ikut terpengaruh. Peningkatan penerimaan sektor pariwisata maupun PAD akan berdampak pada pembangunan Infrastruktur. Infrastruktur dalam pariwisata merupakan salah satu unsur penunjang yang sangat penting, karena jika tidak ada infrastruktur yang memadai maka akses untuk ketempat destinasi pariwisata akan sulit sehingga wisatawan jarang berkunjung. Dari destinasi yang ditargetkan harus disertai peningkatan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana transportasi, pembangunan fasilitas umum, pemeliharaan kawasan, penyediaan BBM dan listrik, penyiapan daya tarik wisata, dan kelembagaan pengembangan destinasi. Potensi yang memantik naluri wisata ini harus bisa dikelola secara maksimal sebab sarana dan prasarana penunjang menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan wisatawan untuk berkunjung.

Pengembangan dan peningkatan pariwisata dalam suatu negara sangatlah penting, karena dengan destinasi pariwisata yang terawat dan tertata baik akan semakin mendatangkan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukannya regulasi yang dapat mengatur dan mengontrol peningkatan kinerja pariwisata. Pembangunan infrastruktur dapat menstimulasi terjadinya peningkatan kinerja sektor pariwisata Indonesia sehingga dapat bersaing dengan negara ASEAN lainnya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan seperti perbaikan jalan, ketersediaan transportasi dan rambu-rambu jalan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan akses informasi melalui media internet seperti media sosial dan website resmi destinasi, dan loket informasi.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah membuahkan hasil dalam tiga tahun terakhir, dimana pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Meskipun pergerakannya tidak terlalu tinggi namun

setiap tahun baik retribusi objek wisata maupun pendapatan asli daerah selalu mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

Hasil analisis kontribusi diatas menunjukkan bahwa meskipun total penerimaan dari sektor pariwisata setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun belum tentu kontribusinya akan mengalami kenaikan pula. Hal ini dapat disebabkan karena penurunan dari total pendapatan sektor pariwisata itu sendiri atau peningkatan dari sumber-sumber PAD lainnya yang lebih besar dibandingkan dengan sektor pariwisata tersebut. Pendapatan total sektor pariwisata Kabupaten Pinrang memang selalu mengalami kenaikan, namun dilain sisi masih ada beberapa pendapatan subsektor yang mengalami penurunan atau bahkan tidak mendapatkan pendapatan sama sekali. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kontribusi yang akan diberikan nantinya. Hasil analisis kontribusi juga menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2018-2022 masih dikatakan sangat kurang, kontribusinya hanya berkisar antara 0,07% - 0,16%.

## 2. Pengaruh Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa retribusi objek wisata tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel retribusi objek wisata sebesar 0,296 dan nilai signifikan sebesar 0,787 lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,05 (5%), nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ( $0,296 > 0,05$ ) sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya retribusi objek wisata tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil pengolahan data variabel Objek Wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang, sehingga tidak sesuai dengan hipotesis dari hasil estimasi tersebut. Hal ini

disebabkan banyaknya objek wisata belum tentu dapat berpengaruh dan menambah jumlah pendapatan daerah yang dikunjungi. Karena, faktor yang paling menentukan dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu dengan banyaknya jumlah pengeluaran, menimbulkan gejala konsumtif di daerah tempat wisata tersebut yang dilakukan oleh wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya pengeluaran yang dilakukan wisnu/wisman di daerah wisata tersebut, seperti pengeluaran dalam hal konsumsi, pengeluaran untuk membayar retribusi tempat wisata dan pengeluaran untuk membayar tempat penginapan/hotel, maka akan berpengaruh pada pendapatan yang akan diterima di daerah tersebut, destinasi wisata juga akan meningkat dan memiliki potensi pengelolaan yang lebih baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penelitian Zulmi (2018), Putri (2020) dan Dewi & Adi (2021) yang menyatakan bahwa objek wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Indriyani (2018) mengatakan bahwa 13 retribusi objek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak terbukti kebenarannya. Hal ini dikarenakan objek wisata di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pariwisata, sehingga retribusi objek wisata yang seharusnya menjadi pemasukan daerah belum sepenuhnya menyeter hasil retribusi objek wisata kepada pemerintah yang mengelola hasil retribusi. Banyak objek wisata yang dikelola oleh pemuda atau lembaga desa tersebut sehingga hasil retribusi objek wisata menjadi pemasukan desa tersebut.

Hasil penelitian ini berdasarkan prinsip akuntansi syariah, Prinsip-prinsip inilah yang menganalisis tentang retribusi objek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut prinsip-prinsip akuntansi syariah

yang menjadi acuan untuk menganalisis tentang retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah.

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah ialah ilmu syariah, maka prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut. Dimana setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan. Secara kongkret transaksi yang dilakukan seorang pebisnis harus dipertanggungjawabkan, salah satunya ialah melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi yang telah dibuat oleh akuntan.

Prinsip ini sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al-qur'an, maksudnya setiap manusia diajarkan untuk selalu bertanggung jawab atas perbuatannya. Di dalam melaksanakan pungutan retribusi objek wisata yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang, benar-benar dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab oleh petugas yang diberikan wewenang dalam mengkordinir retribusi objek wisata di Kabupaten Pinrang serta didalam proses pendataan dan pelaporan penerimaan keuangan yang masuk dari retribusi objek wisata di catat dengan baik dan dilaporkan dengan data yang dapat di pertanggungjawabkan. Maka seruan untuk melaksanakan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Q.S As-Saffat/37:22-24

﴿ أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
﴿ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴾ ﴿٢٣﴾ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾

Terjemahannya:

“(Lalu kepada Malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah, selain Allah; Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena Sesungguhnya mereka akan ditanya (tentang keyakinan dan perilaku mereka)” {Q.S As-Saffat/37:22-24}<sup>44</sup>

Ayat diatas dijelaskan bahwa pegawai atau staff dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugasnya penuh dengan tanggung jawab didalam proses pemungutan maupun pendataan serta laporan pertanggungjawaban pendapatan yang masuk dari Objek Wisata di Kabupaten Pinrang. Sesuai dengan landasan hukum islam yang berlaku maka dalam pencatatan yang dilakukan oleh petugas akan sesuai dengan hasil yang diperolehnya.

#### b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam akuntansi ini memiliki dua pengertian. Pertama ialah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan dalam jurnal dan laporan keuangan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Keadilan disini bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syari'ah dan moral, pengertian inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap rupa akuntansi modern menuju pada sistem akuntansi “alternatif” yang lebih baik. Prinsip keadilan berkaitan dengan prakter moral, yakni kejujuran.

---

<sup>44</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h.446.

Kejujuran ini sangat penting agar informasi mengenai proses penetapan retribusi objek wisata yang diberlakukan di Kabupaten Pinrang adil bagi setiap objek wisata, hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang dalam sistem pemungutannya telah ditetapkan dengan adil sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya permainan dari oknum-oknum yang merugikan. Jadi proses pemungutan atau penagihannya tidak ada kecurangan yang terjadi di dalam proses tersebut. Serta petugas yang diberikan wewenang adil dalam melakukan pencatatan laporan retribusi objek wisata. Keadilan ini menjadi pendorong untuk meningkatkan kontribusi retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pinrang. Maka seruan untuk melaksanakan keadilan yaitu;

Q.S An-Nisa’/4:29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا ۙ ا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”{Q.S An-Nisa’/4:29}<sup>45</sup>

Ayat diatas dapat dijelaskan bahwa dalam setiap perhitungan dan pembayaran retribusi objek wisata harus diberlakukan dengan adil sesuai dengan penetapan yang ditetapkan. kegiatan pemungutan antara

<sup>45</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h.83.

pihak objek wisata dengan Pemerintah Daerah sudah ditetapkan persenan dari retribusi yang dibayarkan. Penentuan penetapan atas dasar negoisasi dalam penentuan besaran retribusi sebelum dilakukan pendataan dan pengelola objek wisata diberikan keadilan dengan pengelola yang menghitung retribusinya sendiri lalu melaporkannya. Pengelola objek wisata diberikan wewenang agar mereka diharapkan adil dalam setiap perhitungan dan pembayaran retribusinya.

### c. Prinsip Kebenaran

Berkesinambungan dengan prinsip keadilan, prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Contohnya pada aktivitas pengakuan, pengukuran dan pelaporan yang tentu saja akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan rasa kebenaran. Prinsip kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mencatat, mendata, menagih serta melaporkan setiap pemungutan retribusi objek wisata di Kabupaten Pinrang. Maka seruan untuk melaksanakan prinsip kebenaran yaitu;

Q.S Al-Baqarah /2:42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”{Q.S Al-Baqarah/2:42}<sup>46</sup>

Berdasarkan Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil tentang analisis akuntansi syariah tentang pengaruh retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah menggunakan 3 prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, prinsip kebenaran, dimana dari ketiga prinsip tersebut terdapat ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana dalam

<sup>46</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h.7.

pencatatan maupun pengolahan pendapatan yang diperoleh dari retribusi objek wisata dilakukan dengan adanya pertanggungjawaban, keadilan serta kebenaran. Ketiga prinsip ini telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang dalam proses pendataan dan pelaporan retribusi objek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang. Adapun data tersebut sebagai berikut:

**Tabel 4.11 Data Penerimaan Retribusi Objek Wisata dan PAD Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022**

Tahun	Retribusi Objek Wisata	Pendapatan Asli Daerah
2018	188.130.000	130.651.467.245,38
2019	215.395.000	133.363.942.030,14
2020	92.100.000	131.174.527.320,35
2021	141.395.000	134.066.655.485,33
2022	174.540.000	158.121.561.743,63

*Sumber Data: BPKPD Kabupaten Pinrang*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir retribusi objek wisata tertinggi pada tahun 2019 sebesar 215.395.000 dan terendah pada tahun 2020 sebesar 92.100.000, sedangkan Pendapatan Asli Daerah tertinggi pada tahun 2022 sebesar 158.121.561.743,63 dan terendah pada tahun 2018 sebesar 130.651.467.245,38.

Prinsip pertanggungjawaban diketahui yaitu dalam melaksanakan pungutan retribusi objek wisata yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang, benar-benar dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab oleh petugas yang diberikan wewenang dalam mengkordinir retribusi objek wisata di Kabupaten Pinrang serta didalam proses pendataan dan pelaporan penerimaan keuangan yang masuk dari retribusi objek wisata di catat dengan baik dan dilaporkan dengan data yang dapat di pertanggungjawabkan.

Prinsip keadilan diketahui informasi mengenai proses penetapan retribusi objek wisata yang diberlakukan di Kabupaten Pinrang adil bagi setiap pengelola, hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan

Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang dalam sistem pemungutannya telah ditetapkan dengan adil sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya permainan dari oknum-oknum yang merugikan. Jadi proses pemungutan atau penagihannya tidak ada kecurangan yang terjadi di dalam proses tersebut. Serta petugas yang diberikan wewenang adil dalam melakukan pencatatan laporan penerimaan retribusi objek wisata. Keadilan ini menjadi pendorong untuk meningkatkan kontribusi retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pinrang

Prinsip Kebenaran diketahui yaitu Prinsip kebenaran menciptakan keadilan dalam mencatat, mendata, menagih serta melaporkan setiap retribusi objek wisata di Kabupaten Pinrang. Karena pengakuan, pendataan dan pelaporan dalam setiap kegiatan pemungutannya sudah mendapat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan objek wisata.

Ketiga prinsip inilah yang dapat mengatasi kecurangan yang terjadi dari setiap pelaporan serta pemungutan retribusi objek wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pinrang.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Retribusi Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang hanya berkisar antara 0,07% sampai 0,16%. Pada tahun 2018 kontribusi objek wisata sebesar 0,14% terhadap PAD dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,16% sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,07% dan untuk tahun 2021 sebesar 0,10% sedangkan untuk tahun 2023 sebesar 0,11%.
2. Retribusi Objek Wisata tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini terlihat melalui uji t variabel retribusi objek wisata sebesar 0,296 dan nilai signifikan sebesar 0,787 lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,05 (5%), nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ( $0,296 > 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Objek Wisata tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang.

### **B. Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Pinrang sebaiknya melakukan peningkatan program-program yang berkaitan dengan promosi pariwisata dan meningkatkan fasilitas dan perawatan objek wisata yang lebih baik, fasilitas yang baik akan mempengaruhi kunjungan wisatawan ke objek wisata.
2. Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu menambah alokasi dana untuk pengembangan pariwisata dengan melakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam membuat program paket wisata dengan cara memberikan paket wisata dengan harga khusus atau kegiatan wisata lainnya, karena dengan pengembangan pariwisata akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan meningkatkan penerimaan daerah dari retribusi objek wisata, sehingga akan meningkatkan anggaran pembangunan daerah.

3. Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas hal yang sama pada tempat lain. Bagi peneliti yang akan meneliti tentang pendapatan asli daerah (PAD) pada tempat yang sama disarankan mengaitkannya dengan variabel lain seperti jumlah wisatawan dan jumlah objek wisata.



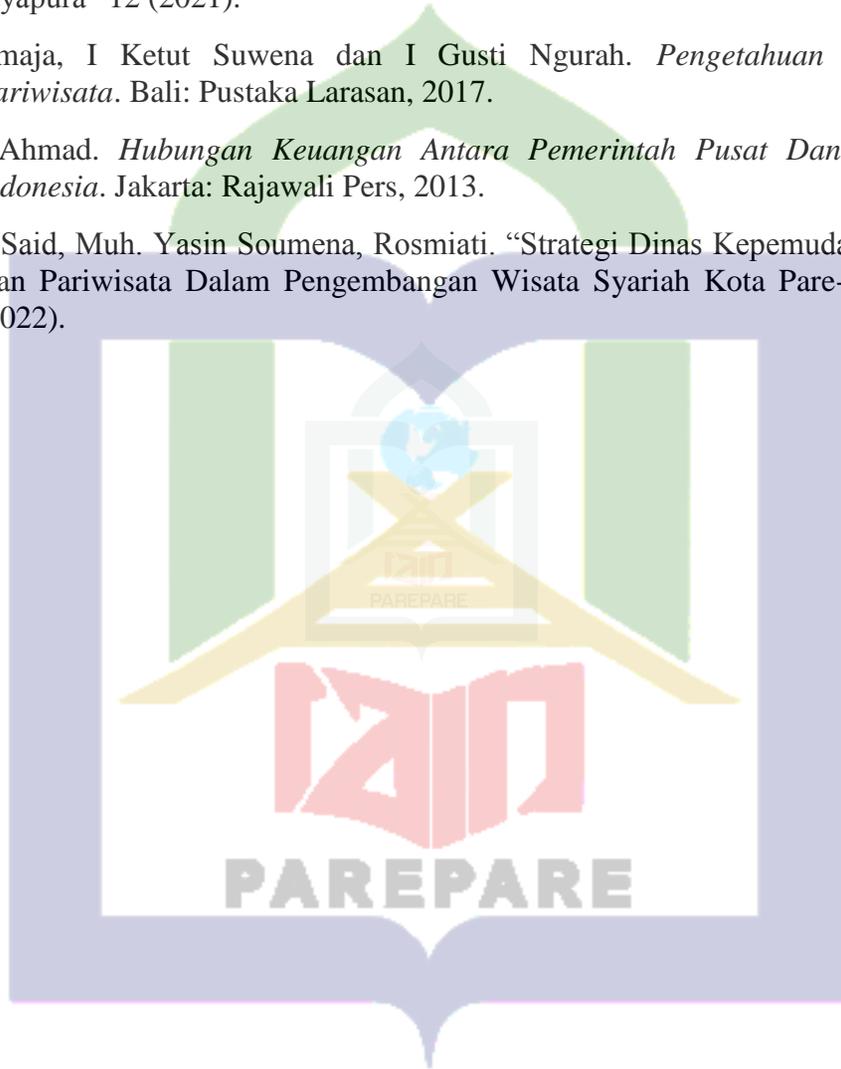
## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Quran Al-Karim*

- Antari, Ni Luh Sili. “Peran Industri Pariwisata Terhadap Penerimaan Asli Daerah Gianyar.” *Jurnal Perhotelan Dan Pariwisata* 3 (2013).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arraniry, Fernanda. “Analisi Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” 2018.
- Boskin, Michael J. *Fiscal Policy for Economic Growth. Economists’ Voice*. Vol. 9, 2012. <https://doi.org/10.1515/1553-3832.1898>.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Darwin. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2010.
- . *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2010.
- Dewi, Yulian Anshita. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Indeks Pembangunan Manusia Dan Investasi Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Provinsi Bali Tahun 2010-2019).” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021.
- dkk, Sofyan Yamin. *Regresi Dan Korelasi Dalam Genggaman Anda : Aplikasi Dengan Software SPSS, Eviews, Minitab, Dan Statgraphics*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Dkk, Susanto. *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Faisal Zulmi. “Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah,” 2018.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2016.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Hastuti, Proborini. “Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia.” *Simposium Nasional Keuangan Negara* 1, no. 1 (2018):.. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>.
- Hidayaty, Maelin Sofiya. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana

- Perimbangan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Di Pulau Jawa Tahun 2010-2018)." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.
- Julianita, Haryadi Sarjono dan Winda. *SPSS vs LISREL : Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Khoir, Fawaidul, Hety Mustika Ani, and Wiwin Hartanto. "Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2017." *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 12, no. 2 (2018).
- Liga Suryadana dan Vanny Octavia. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Makkawaru, M Taufik Maskur. *Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Buntu Burake Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja*. *Kaos GL Dergisi*. Vol. 8, 2020.
- Martini, Rita, Septian Bagus Pambudi, and M Husni Mubarak. "Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang" 2, no. 1 (2019).
- Muljadi, A.J. *Kepariwisata Dan Perjalanan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Octavis, M. Liga Suryadana dan Vanny. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Prakosa, Kesit Bambang. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. UII Press, 2005.
- Rahardjo Adisasmita. *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Rahmatullah, Hugo Itamar; A. Samsu Alam; "Strategi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Tana Toraja." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 2 (2014).
- Rochmansjah, Chabib Soleh dan heru. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Sandi, Fajar Billy. "Retribusi Daerah: Pengertian, Jenis, Tarif, Dan Bedanya Dari Pajak Daerah," 2019. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah>.
- Santoso, Singgih. *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999.
- sanusi, Anwar. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

- Sasmita, Novia. “Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Periode 2009-2018 Skripsi Novia Sasmita Jurusan Ekonomi Pembangunan,” 2019.
- Suharyadi. *Statistika Dan Keuangan Modern*. Yogyakarta: Salemba Empat, 2013.
- Tappi, Verdi Payung. “Analisis Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Jayapura’ Jurnal Ekonomi & Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura” 12 (2021).
- Wdyatmaja, I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Bali: Pustaka Larasan, 2017.
- Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Zainal Said, Muh. Yasin Soumena, Rosmiati. “Strategi Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Wisata Syariah Kota Pare-Pare” Vol 1 (2022).





# LAMPIRAN

## OUTPUT PENELITIAN

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Retribusi_Objek_Wisata	5	92100000.00	215395000.00	162312000.0000	47437179.06347
Pendapatan_Aslil_Daerah	5	130651467245.38	158121561743.63	137475630764.9660	11630291000.73191
Valid N (listwise)	5				

### Hasil Uji Normalitas

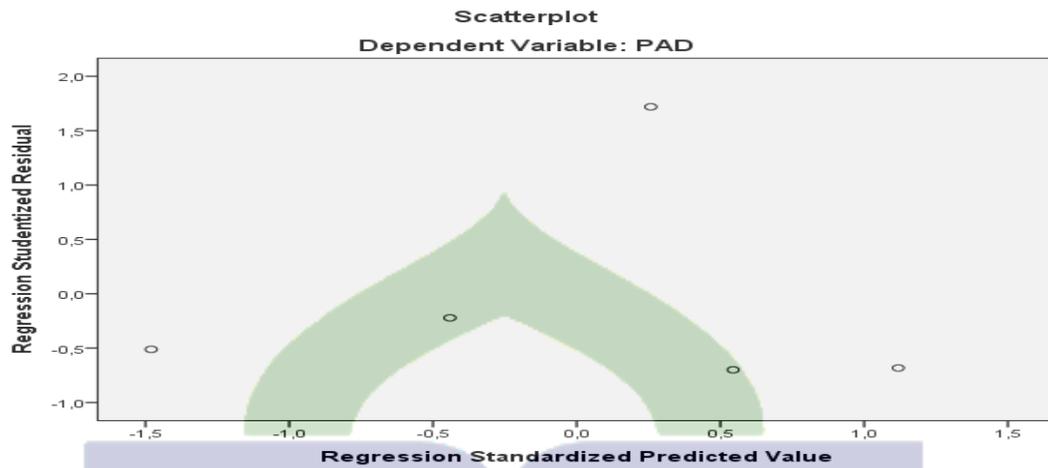
#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-,0000107
	Std. Deviation	11464106329,06689500
	Absolute	,388
Most Extreme Differences	Positive	,388
	Negative	-,246
Kolmogorov-Smirnov Z		,867
Asymp. Sig. (2-tailed)		,439

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### Hasil Uji Heterokedastisitas



### Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1307724555 38,689	2340801270 7,229		5,587	,011
	Retribusi_Objek_Wisata	41,298	139,528	,168	,296	,787

a. Dependent Variable: PAD

### Hasil Uji Parsial (Uji T)

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	1307724555 38,689	2340801270 7,229		5,587	,011
a	Retribusi_Objek_Wisat 41,298	139,528	,168	,296	,787

a. Dependent Variable: PAD

### Hasil Uji Korelasi Person Product Moment

#### Correlations

		Retribusi Objek Wisata	PAD
Retribusi Objek Wisata	Pearson Correlation	1	,168
	Sig. (2-tailed)		,787
	N	5	5
PAD	Pearson Correlation	,168	1
	Sig. (2-tailed)	,787	
	N	5	5

## SURAT IZIN PENELITIAN DARI KAMPUS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-5685/In.39/FEBI.04/PP.00.9/10/2023 24 Oktober 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MARHAMA  
Tempat/Tgl. Lahir : BONGING PONGING, 03 Oktober 2001  
NIM : 19.2800.057  
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : DESA LOTANG SALO KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGARUH RETRIBUSI OBJEK WISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan bersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :  
1. Rektor IAIN Parepare

**IAIN  
PAREPARE**

## SURAT IZIN PENELITIAN DARI PEMERINTAH DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0686/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2023  
 Tentang  
**REKOMENDASI PENELITIAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 08-11-2023 atas nama MARHAMA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1335/RI.Teknis/DPMPTSP/11/2023, Tanggal : 08-11-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (RAP) Nomor : 0686/RAP/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2023, Tanggal : 08-11-2023

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti	: MARHAMA
4. Judul Penelitian	: PENGARUH RETRIBUSI OBJEK WISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: BAGIAN KEUANGAN BPKPD DAN BPS KAB. PINRANG
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto

**KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 08-05-2024.

**KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 08 November 2023



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## SURAT SELESAI MENELITI



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Bintang Nomor 1 Tlp. (0421) 923 658  
PINRANG 91212

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 841 / BPKPD / XII / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGURHAN, SE.Ak., MM**

N I P : 19710812 200312 1 001

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk. I, IV/b

Jabatan : Kepala BPKPD Kab. Pinrang

Memberikan Keterangan bahwa :

Nama : **MARHAMA**

NIM : 19.2800.057

Tempat/tanggal lahir : Bonging Ponging, 03 Oktober 2001

Alamat : Bonging Ponging Desa Lotang Salo Kec. Suppa Kab.Pinrang

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan/Konsentrasi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telepon : 082 348 938 380

Telah melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Pengaruh Retribusi Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang" dari Tanggal 16 November s/d 18 Desember 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 Desember 2023



## BIODATA PENULIS



**MARHAMA**, Lahir di Bonging Ponging pada tanggal 3 Oktober 2001. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Ernawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat Pendidikan penulis memulai Pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SD Negeri 108 Bonging Ponging pada tahun 2007-2013. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Suppa pada tahun 2013-2016.

Selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Pinrang pada tahun 2016-2019. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis mengikuti program Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Betteng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. Dan penulis melakukan penelitian di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah dengan judul ***“Pengaruh Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang”***

PAREPARE